



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN
22 JULI 2008

REFLEKSI TENTANG PROSES PEMBUATAN HUKUM DI TIMOR LESTE

Update Keadilan ini akan mempertimbangkan sebagian proses pengembangan legislatif di Timor Leste dan akan memberi analisa tentang hal-hal yang diprihatinkan.

Parlemen Nasional adalah lembaga yang diberi kewenangan dalam Konstitusi untuk membuat undang-undang demi kepentingan masyarakat. Salah satu fungsi utama Parlemen adalah merancang undang-undang.

Para anggota Parlemen dibagi dalam beberapa Komite yang mempertimbangkan kebijakan mengenai masing-masing aspek pemerintahan. Setiap Komite bertanggungjawab untuk menyiapkan dan membahas rancangan undang-undang tentang persoalan yang relevan dengan tanggungjawabnya, yang kemudian dipresentasikan kepada Dewan Menteri untuk dipertimbangkan. Apabila pendekatan ini dilaksanakan dengan baik, maka anggota Komite dapat mengembangkan keahlian tentang masalah khusus yang dihadapi oleh Komitennya supaya dapat merancang solusi yang memadai.

Dewan Menteri terdiri dari semua kepala departemen pemerintah, dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Parlemen untuk diteliti dan diperdebatkan. Dewan Menteri juga dapat mengeluarkan Penetapan yang memberlakukan keputusan tertentu (perjanjian internasional, misalnya) yang tidak perlu disetujui oleh Parlemen. Dewan Menteri juga dapat berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan untuk

mendapatkan informasi tentang perdebatan kebijakan, namun sayangnya bahwa kewenangan ini jarang dilaksanakan.

Setiap anggota Parlemen juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) melalui petisi langsung kepada sesi pleno Parlemen. Oleh karena rancangan tersebut belum disetujui melalui sistem Komite, maka harus ditinjau secara teliti. Usulan legislatif yang tidak diteliti oleh Komite, yang merupakan jalan utama, harus ditinjau secara sangat seksama.

Diperlukan periode pertimbangan untuk menjamin bahwa rancangan undang-undang dianalisa secara tepat. Melalui wawancara dengan sejumlah anggota parlemen, baru-baru ini JSMP mengetahui bahwa sebagian anggota tidak memberi suara tentang undang-undang Pengacara Swasta karena tidak mempunyai waktu memadai untuk mempertimbangkan RUU ini, dan tidak mengerti isinya. Jelas bahwa ada keperluan untuk memperbaiki proses-proses untuk mendidik anggota parlemen tentang agenda legislatif.

Aturan prosedur Parlemen memberi kewenangan kepada setiap komite untuk mengadakan konstulasi dengan pihak yang berkepentingan, atau mengadakan sidang publik untuk membahas usulan kebijakan. JSMP mengamati bahwa konsultasi tersebut biasanya hanya dilakukan di ibu kota Dili. Orang-orang di distrik jarang dikonsultasi tentang isi RUU, yang menimbulkan keraguan tentang perwakilan yang adil.

Mitra lain yang tidak sulit dihubungi seringkali tidak dikonsultasi. Misalnya, undang-undang tentang senjata yang baru-baru ini disampaikan oleh Perdana Menteri mengusul agar PNTL bertanggungjawab atas sistem pendaftaran senjata api - JSMP mengetahui bahwa tidak ada program konsultasi dengan polisi sebelum usulan legislatif ini disampaikan kepada Parlemen.

Setelah sebuah undang-undang disetujui oleh Parlemen, diasumsi bahwa untuk keperluan penegakan undang-undang tersebut, setiap warga negara mengetahui arti dan penerapannya. Selain daripada konsultasi publik, masyarakat harus diberitahu tentang perundang-undangan pada saat pengesahan agar mereka dapat mengetahui bagaimana undang-undang baru itu akan berdampak pada mereka.

Oleh karena tidak ada mekanisme pemerintah yang secara konsisten mendistribusikan informasi kepada publik tentang perkembangan hukum, maka sulit bagi publik untuk menaati hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Timor Leste tinggal di luar pusat distrik.

Pengadilan di Baucau, Suai dan Oecusse dapat menjadi pusat pembagian informasi tentang proses yudisial. Namun, diluar pusat distrik tersebut, rupanya bahwa hukum adat lebih dikenal dan tersedia sebagai metoda penyelesaian sengketa.

Proses perancangan undang-undang juga harus mempertimbangkan faktor sejarah dan sosiologi berdasarkan konteks yang relevan. Keperluan ini untuk mencerminkan kondisi lokal berlawanan dengan ketergantungan pada model doktrin hukum dari jaman kolonial. Undang-undang Portugal, misalnya, yang sesuai dengan konteks domestik yang berbeda tentang perlindungan dan pembatasan, seharusnya tidak diterapkan sebagai patokan untuk undang-undang Timor Leste kalau belum dimodifikasi secara signifikan.

Dengan mengingat bahwa Timor Leste adalah negara demokrasi yang baru merdeka, dan tindakan politik belum diatur secara komprehensif, maka apabila merancang undang-undang di sini seharusnya tidak ada asumsi tentang jaminan atau perlindungan yang dinyatakan secara tidak langsung dalam sistem hukum lain yang sudah lama ditetapkan. Daripada mengacu pada undang-

undang dari negara seperti Portugal yang kurang sesuai dengan konteks Timor Leste, barangkali lebih baik untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara pasca-konflik lainnya.

JSMP melihat bahwa banyak usulan legislatif dikembangkan dan disiapkan untuk diperdebatkan. Namun, rupanya bahwa banyak usulan tidak dapat dilanjutkan. Selain daripada persoalan prioritas politik, tumpukan RUU ini sebagian disebabkan oleh kegagalan anggota parlemen untuk mengikuti sesi yang diadakan untuk membahas isi RUU tersebut.

Penjadwalan sesi agar Komite dapat membahas persoalan penting harus termasuk penetapan agenda untuk membahas RUU. Seringkali pembahasan RUU ditunda karena jumlah anggota yang hadir tidak sampai dua per tiga, sehingga tidak mencapai korum. Faktor-faktor ini mencegah Parlemen dari menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Persoalan bahasa merupakan halangan signifikan yang mencegah pengembangan hukum yang efektif dan partisipatif. Ada keprihatinan bahwa bahasa Portugis digunakan untuk merancang setiap undang-undang, yang merupakan masalah bagi sejumlah anggota Parlemen yang kurang menguasai bahasa ini, serta mayoritas masyarakat Timor Leste yang tidak fasih berbahasa Portugis. Penggunaan istilah hukum, walaupun diperlukan, juga menghalangi pengertian.

Sejumlah anggota Parlemen dan anggota masyarakat telah menyampaikan keprihatinannya tentang persoalan bahasa. Disarankan agar teks asli dalam bahasa Portugis harus diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun agar anggota Parlemen dapat mengerti dengan baik dan memberi pendapat tentang RUU yang merupakan tanggungjawab kolektifnya.

Pada kesimpulannya, JSMP menghimbau kepada Parlemen untuk terlebih dahulu menjamin bahwa sistem Komite dapat beroperasi secara lebih efektif sebagai mekanisme konsultasi, dengan mengundang masukan dari baik publik maupun pihak yang berkepentingan. Proses ini seharusnya memungkinkan anggota Parlemen untuk lebih mengenal bidang yang mendasari setiap kebijakan, dan mengkomunikasikan usulan legislatif kepada rekan politik dan masyarakat.

Oleh karena belum ada kantor yang membagi informasi hukum kepada masyarakat, maka tanggungjawab ini tetap diberikan kepada anggota Parlemen dan masyarakat sipil. Apabila pembahasan dilakukan dalam bahasa yang lebih dimengerti oleh semua pihak, maka kualitas perdebatan akan meningkat, yang akan lebih mempertimbangkan kondisi Timor Leste pada saat merancang undang-undang. Hal ini juga akan membantu pendistribusian informasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan penataan terhadap undang-undang.

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi:

Casimiro dos Santos, Direktur ad interim JSMP

Email: casmiro@jsmp.minihub.org

Telepon Kantor: 3323883